

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corporate governance menjadi hal penting, terutama saat terjadi krisis ekonomi global yang melanda hampir di seluruh dunia. Sistem *corporate governance* dapat mempengaruhi pembentukan sistem tata kelola perusahaan di negara-negara yang berbeda, seperti peraturan, struktur kepemilikan, budaya dan lingkungan ekonomi. Mekanisme dalam penerapan *corporate governance* merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik keagenan (Destriana, 2011).

Perusahaan *go public* di Indonesia strukturnya dicirikan dengan pemisahan antara pemilik dan pengelola. Pemegang saham (*principals*) akan menyewa orang lain atau manajer (*agents*) untuk mengelola perusahaan, yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan hubungan *principals-agents*. “Hubungan *principal-agent* dapat memunculkan *agency problem* dalam perusahaan” (Jensen dan Meckling, 1976). *Agency problem* yang tinggi berada pada perusahaan atau Negara yang ditandai karakteristik ketidakpastian yang tinggi pula seperti pertumbuhan industri yang tinggi, *emerging market* dan Negara berkembang (Munisi dkk.,2014). Indonesia termasuk negara *emerging market*, yang berarti secara internasional Indonesia diakui sebagai negara dengan potensi ekonomi yang patut diperhitungkan.

Pada umumnya pemegang saham atau pemilik menginginkan agar perusahaan bisa tetap eksis dan substain dalam persaingan industri dan terhindar

dari *agency problem* yang tinggi, sehingga pemegang saham memilih agen yang dapat mengkoordinasikan perusahaan dengan tata kelola yang baik. Jansen (1993) menjelaskan bahwa struktur dewan perusahaan dianggap sebagai instrument pengawasan yang baik bagi para pemegang saham. Tiga karakteristik yang mempengaruhi pengawasan (*monitoring*) adalah ukuran dewan, komposisi dewan dan struktur kepemimpinan. Peranan dewan sangat penting untuk memonitor manajemen agar sesuai dengan standar yang berlaku dan mencegah terjadinya praktek kecurangan dan meningkatkan nilai perusahaan. Jensen dan Meckling (1976), mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi yang lebih besar dapat mengurangi keefektifan pengawasan karena komunikasi dan koordinasi serta kemampuan dewan dalam mengendalikan manajemen dapat menimbulkan masalah keagenan. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa *outside director* akan lebih efektif dalam memonitor manajemen selain itu *outsider* juga lebih banyak memberikan *expert knowledge* dan nilai tambah bagi perusahaan.

Corporate board structure di Indonesia menganut *two-tier system* yang dikarakteristikan sebagai *management board* dan *supervisory board*. Dalam sistem dua tingkat (*two-tiers*), Pemegang saham akan menunjuk sekelompok pengelola operasi perusahaan (*management*) dan juga pengawas dan penasihat manajemen yang disebut komisaris (*Commissioners*). Keduanya bertanggung jawab, diangkat dan di berhentikan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Struktur dewan perusahaan di Indonesia terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris, dan independen komisaris yang merupakan pihak yang melakukan

monitoring secara independen dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan perusahaan dan pemegang saham.

Struktur dewan perusahaan merupakan hasil dari menyeimbangkan kepentingan dari *stakeholder* yang berbeda termasuk pemilik. Pemilik yang berbeda mungkin menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dari perilaku dan pilihan untuk tata kelola perusahaan yang cenderung mempengaruhi struktur dewan (Munisi dkk.,2014). Beberapa penelitian mengenai struktur dewan perusahaan mulai dikembangkan dengan baik di beberapa Negara. Mak dan Li (2001) menemukan bahwa komisaris independen memiliki hubungan negatif dengan kepemilikan manajerial, *board size* dan kepemilikan pemerintah. Penggunaan struktur kepemimpinan ganda secara positif memiliki hubungan dengan *blockholder ownership*, dan negatif dengan regulasi dan kepemilikan CEO. Aggarwal dkk.,(2010) dan Essen dkk.,(2011) menemukan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap komisaris independen. Monem (2014) juga meneliti mengenai struktur dewan perusahaan dan hasilnya menunjukkan bahwa lebih besar ukuran perusahaan serta tingkat utang yang lebih tinggi akan membutuhkan pengawasan yang lebih oleh dewan dalam suatu perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi akan berpengaruh terhadap jumlah komisaris independen. Dan Munisi, dkk.,(2014) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan *board size*. Dan kepemilikan pemerintah memiliki hubungan secara positif dengan komisaris independen sementara konsentrasi kepemilikan memiliki

hubungan negatif dengan komisaris independen. Dalam penelitian ini berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dan penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh struktur kepemilikan terhadap struktur dewan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI Periode 2010-2013.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini , yaitu :

1. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ukuran dewan direksi perusahaan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 sampai dengan 2013?
2. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap komisaris independen pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 sampai dengan 2013 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti maka dapat disusun tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap ukuran dewan direksi perusahaan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.
2. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap komisaris independen pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, khususnya mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Memberikan informasi kepada para *board structure* yaitu dewan direksi dan komisaris dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang dapat mengurangi *agency problem* sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor dalam menyusun strategi investasi yang optimal tepat pada perusahaan yang tepat pula dengan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Bagi para akademisi, sebagai kontribusi terhadap penelitian mengenai tata kelola perusahaan sekaligus menjadi bahan acuan lebih jauh untuk kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan *corporate governance*.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan penelitian ini, pengembangan hipotesis, model analisis, serta kerangka berpikir untuk memudahkan penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Mengulas metodologi penelitian mencakup ruang lingkup penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, metode penentuan sampel dan teknik pengolahan sampel penelitian.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas gambaran umum mengenai subjek penelitian, deskripsi dari variabel penelitian, analisis model, dan pembuktian hipotesis serta pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, serta saran dari hasil penelitian.